



Tanggapan
Peluncuran Corruption Perception Index (CPI) 2021
Jakarta 25 Januari 2022



- Apresiasi kepada Transparency International yang konsisten dan sudah 26 kali secara global meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Hasil temuan tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia.
- Sejak 1995 IPK Indonesia mengalami peningkatan dan mencapai skor 40 pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 37 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 menjadi 38. Dari segi peringkat Indonesia juga mengalami kenaikan. Tahun 2020 di peringkat 102 dari 180 negara, tahun 2021 naik menjadi peringkat 96 dari 180 negara.
- Dari sudut persepsi publik, secara global pandemi Covid-19 yang memerlukan kebijakan khusus dan percepatan penanganan juga menimbulkan masalah korupsi dan kemerosotan demokrasi.



-
- Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan korupsi dengan kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfungsi sebagai acuan kementerian, Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
 - Pemerintah terus mengembangkan sistem anti korupsi dalam pelayanan publik melalui penilaian wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Juga dikembangkan wistleblower system untuk mendeteksi sejak dini perilaku koruptif serta mengambil langkah penindakan tegas.
 - Kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam upaya-upaya pencegahan korupsi terus dikembangkan secara intensif



-
- Penguatan SPPT-TI, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Uang Kartal, Penyelesaian BLBI, menguatkan profesionalitas APH, terus berupaya menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force); sekarang kita masih menjadi observer. Kita juga melakukan upaya pemberantasan *shadow economy* dengan melakukan penguatan pada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
 - Beberapa kasus korupsi dengan kerugian besar yang diungkap dan dituntaskan antara lain Jiwasraya dan Asabri serta pengungkapan penerimaan suap/grativikasi yang melibatkan pejabat negara baik di tingkat Menteri sampai Kepala Daerah.
 - Dalam masa pandemic covid 19 pemerintah mengoptimalkan system pemberantasan korupsi terutama di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan harkat hidup orang banyak seperti: bantuan sosial, sumber daya alam, Pendidikan, Kesehatan, pertanian maupun perikanan



-
- Aparat penegak hukum harus semakin tegas dalam memberikan sanksi pada pelaku korupsi dalam situasi pandemic Covid-19 agar setiap rupiah uang negara dapat dipergunakan dengan tepat dan berkualitas untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Pada saat yang sama perlu diberikan penghargaan kepada perorangan maupun Lembaga yang peduli dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
 - Indonesia yang semakin bersih dari perilaku koruptif akan mengundang investor lebih yakin berinvestasi di Indonesia karena tidak berbiaya tinggi. Dampak positifnya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pemerintah menghimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) maupun BPK selaku auditor negara dan BPKP selaku auditor internal pemerintah
 - Dengan niat baik dan tekad yang kuat semua komponen bangsa harus bersama-sama, bergandengan tangan, bahu membahu untuk meberantas korupsi di Indonesia.



TERIMA KASIH